ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 - 2018

Atika Maulana Ulfa

Program Studi D3 Akuntansi

STIE Putra Bangsa Kebumen

atikamaulana0@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada BAP3DA Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 serta tingkat efektivitas dan efisiensi program – program pada BAP3DA Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas anggaran belanja tahun 2015 sebesar 96,69%; tahun 2016 sebesar 93,60% ; tahun 2017 sebesar 94,04% ; tahun 2018 sebesar 96,00%. Anggaran belanja secara keseluruhan sudah dikatakan efektif. Program paling efektif pada tahun 2015 adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 93,34% ; tahun 2016 adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 98,28%; tahun 2017 adalah program perencanaan sosial budaya sebesar 98,68%; tahun 2018 adalah program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 95,68%. Program secara keseluruhan sudah dikatakan efektif. (2) Efisiensi anggaran belanja tahun 2015 sebesar 63,37%; tahun 2016 sebesar 62,66%; tahun 2017 sebesar 61,92%; tahun 2018 sebesar 58,49% dan termasuk dalam kriteria efisien. Program paling efisien pada tahun 2015 adalah program kerjasama pembangunan sebesar 1,76%; tahun 2016 adalah program perencanaan wilayah dan sumber daya alam sebesar 045%; tahun 2017 adalah program kerja sama pembangunan sebesar 1,47%; tahun 2018 adalah program kerjasama pembangunan sebesar 1,05% dan secara keseluruhan masuk kriteria sangat efektif.

Kata Kunci: Anggaran Belanja, Efektivitas, Efisiensi

ABSTRACT

The purpose of this research were to analysis the level of effectiveness and efficiency of the expenditure budger of BAP3DA Kebumen 2015 to 2018 and the level of effectiveness and efficiency of programs of Kebumen BAP3DA in 2015 to 2018. The research was carried out at BAP3DA of Kebumen. Data collection technique wa documentation. The type of data used was quantitative data. The results of data analysis showed that: (1) the effectiveness of 2015 budget was 96,69%; 2016 was 93,60%; 2017 was 94,04% and 2018 was 96,00%. The overall budget is said to be effective. The most effective program in 2015 was the program to improve apparatus facilities and infrastructure of 93,34%; 2016 was the program to improve apparatus facilities and infrastructure of 98,28%; 2017 was the 98,68% socio-cultural planning program; 2018 was the office administration services. The overall program is said to be effective. (2) The efficiency of the 2015 budget of 63,37%; 2016 was 62,66%; 2017 was 61,92%; and 2018 was 58,49% and included in the criteria of efficient. The most efficient program at 2015 was the development cooperation program reaching a percentage 1,76%; 2016 was the regional planning program and natural resources of 045%; 2017 the development cooperation program of 147%; 2018 was the development cooperation program of 1,05% and overall was very efficient.

Keyword: Budget, Effectiveness, Efficiency.

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 - 2018

PENDAHULUAN

Revisinya Undang - Undang No.25 tahun 1999 ke Undang - Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi. Sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerahnya masing - masing. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang - Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan. Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dapat dilihat dari derajat fiskal suatu daerah dengan menggunakan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini keuangan daerah merupakan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola manajemen keuangan daerahnya sendiri.

Fungsi dan peran BAP3DA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, dimana mencakup semua kegiatan dalam unit satuan moneter yang aktif dalam periode atau jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah merupakan proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap - tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.

Menurut Sumenge (2013:75) Anggaran publik merupakan alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja / organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan pemerintah.

Kegiatan penganggaran sering timbul masalah dalam realisasi suatu anggaran, termasuk belanja modal. Permasalahan sering muncul pada penatausahaan atas transaksi yang timbul, atau secara spesifik menyangkut masalah perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang sering mendapatkan koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis kesalahan pada *accounting treatment* yang biasanya terjadi adalah pada penetapan mata anggarannya, misalnya belanja modal yang seharusnya didanai dengan menggunakan dana belanja modal ternyata didanai dari belanja barang, atau yang seharusnya didanai menggunakan belanja barang ternyata didanai dari belanja modal.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kebumen serta Kebijakan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahunan disusun berdasarkan program prioritas SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan ntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan. Belanja langsung di Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk keperluan belanja pegawai dan

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 - 2018**

belanja modal menunjukkan peningkatan yang fluktuatif pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.1

Tabel Realisasi Anggaran Belanja tahun 2015-2016

Jenis belanja	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Anggaran 2016	Realisasi 2016
Belanja Tidak Langsung	2.811.800,00	2.788.744,062	3.629.782,000	3.463.456,419
Gaji dan Tunjangan	2.811.800,00	2.788.744,062	3.629.782,000	3.463.456,419
Belanja Langsung	5.063.836,000	4.826.254,032	6.293.926,000	5.821.029,390
Belanja Pegawai	234.716,000	233.971,600	1.362.337,000	1.306.956,900
Belanja Barang	4.326.162,000	4.091.677,182	4.801.039,000	4.385.122,490
Belanja Modal	502.958,000	500.605,250	130.550,000	128.950,000
Jumlah	7.875.636,000	7.614.998,094	9.923.708,000	9.289.458,809

Sumber: BAP3DA Kabupaten Kebumen

Tabel 1.2

Tabel Realisasi Anggaran Belanja tahun 2017-2018

Jenis belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Anggaran 2018	Realisasi 2018
Belanja Tidak langsung	3.674.656,000	3.398.758,939	3.863.299,000	3.754.334,980
Gaji dan Tunjangan	3.674.656,000	3.398.758,939	3.863.299,000	3.754.334,980
Belanja Langsung	5.818.214,000	5.528.518,678	6.144.464,000	5.853.620,418
Belanja pegawai	1.267.348,000	1.180.465,900	738.706,000	702.500,000

Belanja barang	4.198.033,000	4.007.282,787	4.843.790,000	4.636.555,418
Belanja modal	352.233,000	340.770,000	561.968,000	514.565,000
Jumlah	9.492.870,000	8.924.274,626	10.000.776,300	9.607.955,398

Sumber: BAP3DA Kabupaten Kebumen

Selisih gaji pegawai setiap tahunnya selalu berubah karena adanya penambahan pegawai dan penambahan upah untuk pegawai di BAP3DA. Belanja – belanja yang selalu mengalami kenaikan atau penurunan guna menjalankan program-program BAP3DA Kebumen. Melalui tercapainya belanja inilah Bap3da Kebumen memiliki kewajiban untuk melaksanakan program yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Chasanah (2016) dengan tempat dan waktu di BAP3DA Kabupaten Kebumen menemukan periode anggaran dari tahun 2011-2013 tingkat efektivitas anggaran belanja BAP3DA Kabupaten Kebumen mengalami penurunan. Pada tahun 2011 perhitungan efektivitas hasilnya menunjukkan prosentase sebesar 96,53%, mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu 94,86%, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2013 yaitu 94,06% hal ini berarti tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah Bappeda sudah dikatakan efektif. Sedangkan untuk tingkat efisiensi anggaran belanja BAP3DA Kebumen selama periode 2011-2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 perhitungan efisiensi hasilnya menunjukkan prosentase sebesar 39,18%, mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu 44,54% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 56,11% hal ini berarti tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Bappeda Kebumen sudah dikatakan sangat efisien. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah tingkat efektivitas anggaran belanja pada Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sampai 2018?

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 - 2018

- b. Bagaimanakah tingkat efisiensi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sampai 2018?

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sampai dengan 2018.
- b. Untuk mengetahui program dan kegiatan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sampai dengan 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Kata Anggaran merupakan terjemahan dari kata *budget* dalam bahasa Inggris, akan tetapi kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Perancis *bougette* yang berarti *a small bag* atau satu tas kecil. Kata *budget* tersebut digunakan secara formal sebagai suatu rencana keuangan pemerintah pada tahun 1773, yaitu ketika Menteri Keuangan Inggris membawa tas kecil yang berisi proposal keuangan pemerintah yang akan disampaikan ke parlemen. Menurut Bahtiar (2011:123) "Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diukur dalam satu satuan uang yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode tertentu dan sumber yang diusulkan untuk membiayai suatu belanja tersebut".

Mardiasmo (2011:61), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Menurut Nafarin (2012:19), anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.

Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Halim dan Kusufi (2016:48) mengidentifikasi bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal.
4. Anggaran sebagai alat politik.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai alat motivasi.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik

Menurut Bastian (2010:192), anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan, transaksi organisasi keteraturan penyerahan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari persetujuan dan terpublikasi.

Norma dan Prinsip Anggaran

Menurut Halim (2012:140), adapun norma dan prinsip anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi penapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.
2. Disiplin Anggaran
Anggaran dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan kesinambungan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/model harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuran kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 - 2018

dana. Pengangguran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastiaan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

3. Keadilan Anggaran
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok tanpa diskriminasi dalam hal pelayanan.
4. Format Anggaran
APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, maka dapat ditutup melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi disuatu daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Belanja

Pengertian Belanja

Menurut PP No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi kewajiban pemerintah dan tidak diperoleh kembali oleh pemerintah. Belanja juga merupakan bagian utama dari suatu anggaran. Belanja negara maupun daerah merupakan pengeluaran pemerintah dan rekening kas umum negara/daerah sebagai pengurangan kekayaan bersih atau ekuitas dana lancar pada tahun yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Mahmudi (2010:155), belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Sedangkan menurut Tanjung (2012:90), belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan Belanja

Sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah, basis akuntansi belanja negara atau daerah adalah basis kas. Hal ini berarti pengeluaran tunai atau kas negara/daerah pada rekening kas negara atau kas daerah meenjadi dasar pencatatan belanja tersebut. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan oleh kas negara/daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai “Belanja diakui pada sat

terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah” (PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran).

Klasifikasi Belanja

Klasifikasi belanja diatur sebagaimana dalam PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dijabarkan lebih lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemandagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jenis-Jenis Belanja

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

Efektivitas

Pengertian Efektivitas

Menurut Supriyono (2000:29) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula uit tersebut. Menurut Yamit (2003:14),efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan. Menurut Sedarmayanti (2009:59), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Efisiensi

Pengertian Efisiensi

Menurut Kamus Besar Indonesia (2001:284), efisiensi adalah Ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan,ketepatangunaan, kesanggikan serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Menurut Mulyamah (2002:3) efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 - 2018

yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Menurut Kamus Besar Ekonomi (2003:178), efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara factor keluaran (*output*) barang dan jasa dengan masukan (*input*) yang langka di dalam suatu unit kerja, atau ketepatan cara (usaha,kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga biaya). Menurut Hasibuan (2005:233).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pembangunan Daerah (BAP3DA) Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jalan Veteran, No 2, Kebumen – 54311.

Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan selama penelitian, penulis melakukan berbagai cara agar data informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang dikumpulkan berdasarkan metode :

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang ada atau catatan – catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

b. Metode Observasi

Penulis melakukan observasi dengan cara meninjau langsung dan melakukan pengamatan dilokasi untuk mendapatkan data – data yang akurat. Data – data tersebut berupa laporan target belanja dan laporan realisasi belanja di Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pembangunan Daerah (BAP3DA) Kabupaten Kebumen.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka – angka, yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Data kuantitatif berupa Target Anggaran Belanja, Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 serta data – data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptive quantitative analysis method*), yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran

pelaksanaan anggaran belanja, dengan menghitung perbandingan target belanja dengan realisasi belanja langsung yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 melalui data kuantitatif yang sudah diperoleh dalam bentuk informasi berupa angka – angka yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun tolak ukur yang digunakan dalam analisis ini adalah :

- a. Menyajikan data target dan realisasi anggaran belanja pada BAP3DA Kebumen tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- b. Menghitung efektivitas pelaksanaan anggaran belanja BAP3DA Kebumentahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara target anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensinya yang dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Cara untuk mengetahui kriteria efektivitasnya yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1
Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas	Kriteria
Sangat efektif	>100%
Efektif	90 – 99,99%
Cukup efektif	80 – 89,99%
Kurang efektif	60 – 79,99%
Tidak efektif	<59,99%

Sumber : Rampengan (2016:620)

- c. Menghitung Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja BAP3DA kebumen tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Setelah melakukan penilaian efektivitas penulisan menganalisis tingkat efisiensinya diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Realisasi anggaran belanja langsung merupakan anggaran belanja langsung yang sudah dikeluarkan untuk menjalankan program atau kegiatan. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang / jasa, belanja modal.

Adapun cara untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran belanja yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 - 2018

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan rumus, adapun cara mengukur kriteria efisiensinya yaitu sebagai berikut :

Tabel III.2
Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi	Kriteria
Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90 – 99,99%
Cukup efisien	80 – 89,99%
Efisien	60 – 79,99%
Sangat efisien	<59,99%

Sumber : Rampengan (2016:620)

d. Melakukan Penilaian Pelaksanaan Anggaran Belanja BAP3DA

Setelah penulis melakukan analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja kemudian penulis melakukan penilaian secara keseluruhan yang dicapai oleh Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pembangunan Daerah kabupten Kebumen yang dilihat dari hasil perhitungan efektivitas dan efisiensi serta menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Efektivitas

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.811.800.000	2.788.744.062
	Gaji dan Tunjangan	2.811.800.000	2.788.744.062
2.	Belanja Langsung	5.063.836.000	4.826.254.032
	Belanja Pegawai	234.716.000	233.971.600
	Belanja Barang	4.326.162.000	4.091.677.182
	Belanja Modal	502.958.000	500.605.250
	Jumlah	7.875.636.000	7.614.998.094

Sumber: Bap3da Kabupaten Kebumen

Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pembangunan Daerah (BAP3DA) Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jalan Veteran, No 2, Kebumen – 54311.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efektivitas Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015 - 2018

Jenis Belanja	2015		2016		2017		2018	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
Belanja Tidak Langsung	99,18	Efektif	95,41	Efektif	92,49	Efektif	97,17	Efektif
Belanja Langsung	95,30	Efektif	92,48	Efektif	95,02	Efektif	95,73	Efektif
Jumlah Belanja	96,69	Efektif	93,60	Efektif	94,04	Efektif	96,00	Efektif

Sumber : Data Diolah

Tabel Efisiensi

Tahun	Relaisasi Belanja Langsung (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Tingkat efisiensi	Kriteria
2015	4.826.254.032	7.614.998.094	63,37%	Efisien
2016	5.821.029.390	9.289.485.809	62,66%	Efisien
2017	5.528.518.687	8.927.304.626	61,92%	Efisien
2018	5.853.620.418	9.607.955.398	58,49%	Sangat efisien

Sumber : Data Diolah

Efisiensi

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Bap3da Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 menunjukkan prosentase 96,69% dan termasuk dalam kriteria efektif karena berada pada tingkat prosentase 90 – 99,99%. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Bap3da pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,09% menunjukkan prosentase 93,60% dan termasuk dalam kriteria efektif. Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,44% menunjukkan prosentase sebesar 94,04% dan termasuk dalam kriteria efektif. Efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2018 mengalami kenaikan

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAP3DA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 - 2018

sebesar 1,96% menunjukkan prosentase sebesar 96,00% dan termasuk dalam kriteria efektif.

Kecenderungan tingkat efisiensi dari tahun ke tahun dikatakan tiak stabil dari tahun 2015 sebesar 63,37% , tahun 2016 sebesar 62,66%, tahun 2017 sebesar 61,92%, tahun 2018 sebesar 58,49%. Dari ahun 2015 – 2018 pengeluaran anggaran belanja pada tahun 2018 menduduki kriteria sangat efisien.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dengan maksud dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait. Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut Untuk instansi dilakukannya penelitian yaitu kantor BAP3DA Kabupaten Kebumen agar lebih meningkatkan tingkat efektif pada tahun yang akan datang dengan melakukan perencanaan untuk memenuhi target anggaran yang akan ditetapkan guna tercapainya kriteria sangat efektif dan sebaiknya anggaran yang ditargetkan untuk suatu kegiatan dapat dilaksanakan agar tingkat efektivitasnya bisa memenuhi target. Diharapkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan program – program agar mempertahankan tingkat efisien yang tiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik dimana tiap tahunnya masuk dalam kriteria yang sangat efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B., Muchlis, dan Iskandar. 2009. *Akuntansi pemerintah*. Cetakan 1. Akademia. Jakarta barat.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi 3. Erlangga. Yogyakarta.
- Gade, Muhammad. 2002. *Akuntansi Pemerintah*. Edisi Revisi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Herlianto, D. 2015. *Anggaran keuangan*. Cetakan 1. Pustaka baru. Yogyakarta.
- Honga, A. F, dan Ilat. V. 2014. Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. 2 (4) : 278-288
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan. Jakarta.
- Lomboan, S. M., I. Ventje dan E. Inggriani. 2014. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. 2 (3) : 952-961.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Pembaruan. Yogyakarta.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2000. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, D. Iswahyuni. S. Putra, dan Maulidan, R. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. PSAP No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rampengan, M., G. B. Nangoi, dan M. Hendrik. 2016. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) Kota Manado. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*. 16 (3).
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. 18 (1) : 46-58.
- Sumenge, A. S. 2013. Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 1 (3) : 74-81.
- Tjeme. E. B. Klasifikasi Belanja Daerah. 2012. [Http://Wilytjeme.blogspot.com/2012/10/klasifikasi-belanja-daerah_2774.html](http://Wilytjeme.blogspot.com/2012/10/klasifikasi-belanja-daerah_2774.html)
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.